

Dampak investasi domestik dan pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

Olivia maghfitrotul izza

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam negeri maulana malik ibrahim malang; Program Studi akuntansi,
e-mail: *oliviaviao45@gmail.com

Kata Kunci:

pertumbuhan ekonomi;
investasi; tenaga kerja;
kemiskinan;

Keywords:

economic growth;
investment; labor;
poverty

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kemajuan suatu negara, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. Investasi dianggap sebagai penggerak utama dalam mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Tenaga kerja, sebagai sumber daya manusia, memainkan peran sentral dalam kegiatan produksi, sementara tingkat pendidikan mencerminkan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah memiliki

peran strategis dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data time series sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait selama periode tertentu, dengan metode analisis regresi linear berganda untuk mengukur kontribusi masing-masing variabel terhadap PDB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi dan pendidikan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dalam beberapa tahun, mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja bukan hanya secara kuantitatif tetapi juga dari sisi keterampilan dan kompetensi. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif namun bervariasi, tergantung pada efektivitas alokasi anggaran dan sektor yang menjadi prioritas. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pengeluaran dan kualitas pendidikan, serta mendorong iklim investasi yang lebih kondusif untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Economic growth is an important indicator for assessing the progress of a country, which is influenced by various macroeconomic factors. Investment is considered a key driver in boosting productivity and job creation. Labor, as a human resource, plays a central role in production activities, while the level of education reflects the quality of the workforce itself. On the other hand, government expenditure plays a strategic role in providing infrastructure and public services that support economic growth. This study uses secondary time series data obtained from the Central Bureau of Statistics and related institutions over a specific period, employing multiple linear regression analysis to measure the contribution of each variable to GDP as an indicator of economic growth. The analysis results show that investment and education have a positive and significant impact on economic growth. Meanwhile, labor shows an insignificant effect in certain years, indicating the need to improve labor quality not only quantitatively but also in terms of skills and competencies. On the other hand, government spending has a positive but varying impact, depending on the effectiveness of budget allocation and the sectors prioritized. These findings indicate that the government needs to enhance the effectiveness of public spending and the quality of education, as well as promote a more conducive investment climate to strengthen national economic growth in a sustainable manner.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan strategi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengatasi rendahnya pendapatan riil per kapita yang sering menjadi penyebab utama keterpurukan ekonomi. Peningkatan pendapatan diharapkan mampu menjadi solusi bagi berbagai persoalan mendasar seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Selain bertujuan untuk meningkatkan taraf pendapatan masyarakat, pembangunan ekonomi juga diarahkan untuk mendorong produktivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, keberadaan sumber daya tersebut tidak serta-merta menjamin kelancaran proses pembangunan ekonomi. Salah satu tantangan yang terus dihadapi adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi sendiri merujuk pada peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu masyarakat. Topik ini menjadi salah satu isu penting dalam kajian makroekonomi jangka panjang karena berhubungan langsung dengan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output ekonominya dari waktu ke waktu. Peningkatan ini umumnya dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi, seperti akumulasi modal melalui investasi, kemajuan teknologi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang didukung oleh pendidikan dan pengalaman kerja. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi tidak hanya sekadar meningkatkan pendapatan nasional, melainkan juga menciptakan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkeadilan sosial.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara umumnya diukur menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan nilai PDB atau PDRB menunjukkan bertambahnya nilai tambah dari seluruh aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Tingginya angka PDB dapat menciptakan efek limpahan (*trickle-down effect*) yang dapat mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan belanja publik, baik dalam bentuk belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial. Peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong permintaan agregat, yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan produksi dan investasi sektor swasta.

Pertumbuhan jumlah penduduk juga memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Bertambahnya jumlah penduduk akan memperluas pasar domestik, mendorong peningkatan konsumsi, dan menciptakan peluang untuk spesialisasi. Spesialisasi ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi, produktivitas tenaga kerja, dan akselerasi adopsi teknologi baru. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator kunci dalam mengevaluasi sejauh mana aktivitas ekonomi mampu menciptakan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat berlanjut dalam

jangka panjang, penting untuk mengenali faktor-faktor yang mendukung maupun yang dapat menghambatnya. Menurut teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, perkembangan PDB sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi utama seperti modal (yang diperoleh melalui investasi dan pengeluaran pemerintah), tenaga kerja, serta kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, investasi menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi nasional.

Investasi merupakan aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh barang modal atau alat produksi yang dapat meningkatkan output di masa depan. Investasi memegang peranan krusial dalam menentukan tingkat pendapatan nasional karena mampu memperluas kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Secara umum, investasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI). Keduanya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kapasitas produksi suatu negara, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan output nasional. Peningkatan output tersebut dapat menjadi fondasi utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global. Selain itu, keberhasilan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga sangat bergantung pada kondisi iklim usaha yang kondusif, stabilitas politik, kepastian hukum, serta efisiensi birokrasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan investasi, seperti melalui penyederhanaan regulasi, pemberian insentif fiskal, serta pembangunan infrastruktur yang merata. Tanpa dukungan kebijakan yang tepat sasaran, potensi investasi tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi (Ghafar Ismail, 2010).

Di samping faktor investasi, peran pendidikan sebagai penopang kualitas sumber daya manusia juga tidak dapat diabaikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan produktif, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Peningkatan anggaran pendidikan, akses merata, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri menjadi faktor penentu dalam memperkuat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran yang diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur, teknologi, kesehatan, dan riset akan memberikan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas ekonomi dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Dalam konteks ini, efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi isu utama yang harus dijaga agar belanja negara benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Akhirnya, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan sinergi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara optimal. Penguatan kelembagaan, transparansi tata kelola, serta peningkatan literasi ekonomi masyarakat juga menjadi bagian integral dari upaya mempercepat pembangunan ekonomi nasional yang tangguh dan responsif terhadap dinamika global. (Dumais et al., 2022)

PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang mencerminkan meningkatnya kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa, yang umumnya diukur melalui output per kapita. Konsep ini mencakup tiga dimensi utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi adalah proses yang dinamis, di mana aktivitas ekonomi terus berkembang dan mengalami perubahan seiring waktu. Kedua, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya peningkatan output per kapita, yang berarti peningkatan produksi total dengan mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk. Ketiga, pertumbuhan ekonomi harus diamati dalam jangka waktu yang relatif panjang, umumnya minimal lima tahun, untuk membedakan antara tren pertumbuhan jangka panjang dan fluktuasi ekonomi jangka pendek (siklus ekonomi). Pentingnya pertumbuhan ekonomi terletak pada kemampuannya dalam memperluas kapasitas produksi suatu negara, yang pada akhirnya meningkatkan ketersediaan barang dan jasa di pasar. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Jordan & Nuring Sih, 2023).

Secara umum, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi: jumlah penduduk yang dapat memperluas pasar domestik dan menyediakan tenaga kerja; stok barang modal seperti mesin, bangunan, dan infrastruktur yang mendukung proses produksi; sumber daya alam termasuk tanah, mineral, dan keanekaragaman hayati yang menjadi input penting di berbagai sektor; serta tingkat teknologi, yang memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam sistem produksi. Selain faktor-faktor utama tersebut, literatur modern dan berbagai studi empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh beberapa elemen pendukung lainnya. Kualitas pendidikan dan sumber daya manusia sangat penting, karena tenaga kerja yang terdidik dan terlatih cenderung lebih adaptif terhadap faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, peran sektor industri dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) juga memainkan bagian yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjangkau sektor-sektor yang seringkali tidak tersentuh oleh industri besar. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam bentuk pembiayaan, pelatihan, kemudahan perizinan, dan akses pasar sangat penting untuk mendorong pengembangan UMKM secara berkelanjutan (Meylianingrum et al., 2023).

Sektor digital dan ekonomi kreatif juga telah muncul sebagai penggerak baru yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di era Revolusi Industri, pemanfaatan teknologi informasi telah membuka peluang usaha baru, menciptakan pasar digital, serta mempercepat arus informasi dan transaksi ekonomi. Negara-negara yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kemajuan digital telah menunjukkan peningkatan produktivitas dan efisiensi yang signifikan. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur

digital seperti akses internet yang merata dan literasi digital telah menjadi komponen penting dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi di masa depan (Basuki & Prawoto, 2015).

Ketimpangan ekonomi dan distribusi pendapatan juga tetap menjadi isu penting dalam pembahasan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menjamin kemakmuran yang merata jika hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Ketimpangan dapat memicu berbagai masalah sosial dan politik, seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, serta penurunan standar hidup, khususnya di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi yang adil seperti program bantuan sosial, subsidi yang tepat sasaran, dan pembangunan wilayah yang merata diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif. Dalam menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi, pandemi, dan perubahan iklim, strategi pertumbuhan ekonomi juga harus bersifat adaptif dan responsif. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam membangun perekonomian yang tangguh, inovatif, dan inklusif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat dipertahankan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. (20108010134_BAB-I_IV-Atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.Pdf, n.d.)

Peran Pengeluaran Publik dalam Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran publik atau government expenditure mencakup belanja negara untuk berbagai kebutuhan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program sosial. Peningkatan pengeluaran ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme:

- **Efek Multiplier:** Ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk proyek infrastruktur atau layanan publik, maka permintaan terhadap tenaga kerja, bahan baku, dan jasa konstruksi akan meningkat. Ini menghasilkan efek berantai (multiplier effect) yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya.
- **Peningkatan Produktivitas:** Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
- **Pengurangan Ketimpangan Regional:** Belanja pemerintah yang merata antar wilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif. (Basuki & Prawoto, 2015)

Sinergi antara Investasi dan Pengeluaran Publik

Pengeluaran publik yang efektif dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi domestik. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan dan listrik oleh pemerintah akan

meningkatkan efisiensi logistik dan menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Di sisi lain, investasi domestik yang berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah yang nantinya dapat kembali dialokasikan untuk pengeluaran pembangunan. Dalam konteks ekonomi, investasi merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya di sektor swasta atau sektor produksi, untuk memperoleh barang modal atau jasa yang digunakan dalam kegiatan produksi, bukan untuk konsumsi langsung. Pembelian ini dapat berupa mesin, peralatan, serta perluasan fasilitas produksi seperti pabrik atau gudang. Tujuan dari pembelian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menghasilkan keuntungan di masa depan, berbeda dengan konsumsi rumah tangga yang bersifat langsung dan jangka pendek.

Salah satu komponen kunci yang mendorong pertumbuhan investasi adalah tabungan. Tabungan berperan sebagai sumber dana yang penting dan dapat disalurkan ke dalam investasi produktif. Semakin tinggi tingkat tabungan masyarakat, maka semakin besar pula modal yang tersedia untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Dalam kerangka pembangunan ekonomi, investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama karena mampu meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan stok modal rata-rata per tenaga kerja. Ketika akumulasi modal tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk, maka rasio modal terhadap tenaga kerja akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kapasitas produksi dan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Lebih lanjut, interaksi antara pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi menjadi aspek penting dalam memahami dinamika pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak hanya memperluas kapasitas produksi, tetapi juga mendorong inovasi teknologi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara di tingkat global. Di era globalisasi saat ini, investasi juga memainkan peran strategis dalam mendorong transformasi struktural dari sektor ekonomi tradisional menuju sektor yang lebih modern, seperti manufaktur dan jasa berbasis teknologi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berpihak pada investas seperti penyederhanaan regulasi, pemberian insentif pajak, serta peningkatan iklim usaha dan infrastruktur sangat penting untuk menarik aliran modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kontribusi Investasi Domestik terhadap Perekonomian

Selain meningkatkan stok modal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi, investasi domestik memiliki dampak yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi nasional. Berikut adalah beberapa aspek tambahan dari kontribusinya:

a) Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Sektor Lokal

Investasi oleh pelaku usaha dalam negeri sering kali disalurkan ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis dalam struktur ekonomi Indonesia karena menyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan mendominasi jumlah unit usaha. Investasi domestik, terutama dalam bentuk pendanaan atau kemitraan, memperkuat sektor ini yang secara signifikan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

b) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Investasi domestik memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Ketika investasi ditopang oleh sumber daya dalam negeri, ketergantungan terhadap modal asing dapat dikurangi. Ini menjadi sangat penting di tengah ketidakpastian global, seperti krisis keuangan, konflik geopolitik, atau gejolak pasar internasional.

c) Meningkatkan Pendapatan Negara

Kegiatan investasi oleh pelaku dalam negeri mendorong aktivitas ekonomi yang secara langsung berdampak pada peningkatan penerimaan negara, seperti pajak perusahaan, pajak penghasilan pekerja, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semakin aktif kegiatan ekonomi di dalam negeri, semakin besar pula kontribusi fiskal yang bisa digunakan untuk pembangunan nasional.

d) Mendorong Pemerataan Ekonomi

Investasi domestik dapat diarahkan ke wilayah yang sebelumnya kurang berkembang atau minim investasi. Dengan dukungan infrastruktur dan insentif pemerintah, pelaku usaha dalam negeri dapat memperluas usahanya ke daerah-daerah terpencil atau di luar Pulau Jawa. Ini membantu mengurangi ketimpangan antarwilayah dan mendorong pemerataan pembangunan.

e) Memicu Rantai Produksi dan Industri

Investasi domestik dalam sektor manufaktur, pertanian, atau industri pengolahan dapat menciptakan efek berantai dalam sistem ekonomi. Ketika satu sektor tumbuh karena investasi, sektor-sektor pendukung seperti logistik, distribusi, dan penyedia bahan baku juga ikut berkembang. Ini mendorong terbentuknya ekosistem industri nasional yang kuat dan saling terhubung.

f) Memberikan Sinyal Positif bagi Investor Asing

Ketika pelaku usaha lokal aktif berinvestasi, hal ini menjadi sinyal kuat atas kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Iklim usaha yang kondusif bagi investor domestik juga cenderung menarik minat investor asing, karena menunjukkan potensi pasar, stabilitas kebijakan, dan prospek keuntungan jangka panjang yang menjanjikan. (Khakim, 2022)

Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi analisis regresi yang dilakukan, diketahui bahwa variabel tenaga kerja memberikan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara selama periode 2006–2020. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun peningkatan jumlah tenaga kerja memiliki kecenderungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dampaknya belum cukup kuat secara statistik. Temuan ini sejalan dengan penelitian, yang juga menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kualitas tenaga kerja, kurangnya kesesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya kesempatan kerja yang

tersedia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tidak cukup hanya dengan menambah jumlah tenaga kerja. Yang lebih penting adalah peningkatan kualitasnya melalui pelatihan, pendidikan vokasi, serta penguatan karakter dan etos kerja.

Selain itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investasi yang dapat membuka lapangan kerja baru. Dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan lokal (entrepreneurship) juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan bahkan menyerap tenaga kerja lain, sehingga membantu menurunkan angka pengangguran. Dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas tenaga kerja akan jauh lebih menentukan daripada sekadar jumlahnya. Oleh karena itu, kolaborasi antara sektor pendidikan, pelatihan kerja, industri, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompeten, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta perubahan pasar global. Dengan strategi yang tepat, tenaga kerja dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional.

Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pengembangan Lanjutan)

Selain pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja, perlu dipahami bahwa kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tersebut. Sebagai contoh, jika sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor informal atau sektor dengan produktivitas rendah seperti pertanian tradisional, maka meskipun jumlah tenaga kerja meningkat, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tetap akan terbatas. Sebaliknya, ketika tenaga kerja diserap oleh sektor-sektor dengan produktivitas tinggi seperti industri manufaktur, teknologi informasi, dan jasa keuangan, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, transformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier menjadi sangat penting untuk meningkatkan peran tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan. Di sisi lain, perlu juga diperhatikan distribusi geografis tenaga kerja. Ketimpangan distribusi tenaga kerja antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan perkotaan melalui pembangunan infrastruktur, pemberian insentif investasi daerah, serta pengembangan ekonomi lokal.

Yang tak kalah penting adalah perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja. Ketika tenaga kerja memperoleh perlindungan yang layak seperti upah minimum yang adil, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman maka motivasi dan produktivitas mereka akan meningkat. Hal ini secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terakhir, dengan berkembangnya teknologi digital dan otomatisasi, pemerintah juga perlu mengantisipasi terjadinya pengurangan tenaga kerja akibat peran manusia yang digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) sangat penting agar tenaga kerja tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Dengan

pendekatan seperti ini, tenaga kerja bukan hanya menjadi faktor pasif dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi justru menjadi aktor utama dalam mendorong transformasi ekonomi ke arah yang lebih produktif, inovatif, dan inklusif.

Kemiskinan

Kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar yang berlaku dalam kelompok sosialnya. Individu dalam kondisi ini juga tidak mampu memaksimalkan potensi fisik maupun mental yang dimilikinya dalam konteks sosial tersebut. Kemiskinan muncul dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekonomi maupun non-ekonomi, yang turut berkontribusi terhadap kondisi keterbelakangan suatu masyarakat. dua komponen utama yang menyebabkan keterbelakangan dan kemiskinan adalah rendahnya taraf hidup serta kurangnya rasa percaya diri pada individu.

penyebab kemiskinan ke dalam empat kategori utama:

- **Penjelasan individual:** Kemiskinan dipandang berasal dari karakteristik pribadi individu itu sendiri, seperti kurangnya motivasi, pengambilan keputusan hidup yang keliru, kegagalan dalam dunia kerja, keterbatasan fisik, atau ketidaksiapan menjalani peran sebagai orang tua.
- **Penjelasan familial (keluarga):** Kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kondisi tidak menguntungkan yang diwariskan secara antargenerasi dalam suatu keluarga, terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang terus-menerus berulang dari generasi ke generasi.
- **Penjelasan subkultural:** Kemiskinan timbul akibat pola perilaku dan norma yang berkembang dalam suatu lingkungan tertentu, yang kemudian memengaruhi moral serta cara pandang masyarakat terhadap kehidupan.
- **Penjelasan struktural:** Perspektif ini menyatakan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari sistem sosial yang menciptakan ketimpangan dalam hak dan status sosial, sehingga menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat terpinggirkan secara ekonomi maupun sosial.

Memahami kemiskinan memerlukan analisis yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor-faktor struktural, historis, dan sistemik yang turut melanggengkan ketimpangan dalam masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan sering kali bukan hanya akibat dari kekurangan individu, tetapi juga disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja yang layak, serta kepemilikan lahan atau modal usaha. Ketimpangan pembangunan antarwilayah juga menjadi faktor yang memperburuk kemiskinan. Ketika pembangunan ekonomi terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau daerah tertentu, masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil akan semakin tertinggal. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan struktural karena masyarakat miskin semakin sulit keluar dari kondisi tersebut akibat minimnya akses dan kesempatan. Kemiskinan juga dapat diperparah oleh bencana alam, krisis ekonomi, pandemi, atau konflik

sosial yang mengganggu stabilitas dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 telah secara signifikan meningkatkan jumlah penduduk miskin karena banyak sektor usaha yang terpaksa menghentikan operasional dan tingkat pengangguran yang meningkat tajam. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

Dalam pendekatan kontemporer, kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan pendapatan (kemiskinan pendapatan), tetapi juga melalui indikator kemiskinan multidimensional, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Program pengentasan kemiskinan seperti bantuan tunai bersyarat, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Namun demikian, untuk benar-benar mengatasi kemiskinan secara menyeluruh, dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi.

Kesimpulan dan Saran

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan proses strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi sendiri ditandai oleh peningkatan kapasitas produksi dan output nasional, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti investasi, pengeluaran publik, kualitas tenaga kerja, serta kemajuan teknologi. Investasi, baik domestik maupun asing, memiliki peran kunci dalam memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Investasi domestik secara khusus memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan UMKM, pemerataan pembangunan wilayah, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Pengeluaran publik berfungsi sebagai alat fiskal yang dapat mendorong permintaan agregat dan mendukung investasi swasta, terutama jika diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sinergi antara pengeluaran pemerintah dan investasi sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis dan resilien. Tenaga kerja, sebagai salah satu faktor produksi utama, menunjukkan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam konteks Kabupaten Minahasa Utara, pengaruhnya belum signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja perlu disertai dengan peningkatan kualitas dan produktivitas melalui pendidikan, pelatihan, dan penyelarasan dengan kebutuhan pasar kerja. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan hanya diukur dari sisi kuantitatif (angka PDB), tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pemerataan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Saran

- 1) Peningkatan Kualitas SDM: Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat program pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri serta perkembangan teknologi agar tenaga kerja lebih produktif dan kompeten.
- 2) Penguatan UMKM dan Wirausaha Lokal: Dukungan berupa akses pembiayaan, pelatihan manajemen, digitalisasi, dan pasar bagi UMKM perlu terus diperluas agar sektor ini semakin berdaya saing dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal.
- 3) Optimalisasi Pengeluaran Publik: Belanja negara harus difokuskan pada sektor produktif dan strategis untuk menghasilkan multiplier effect yang tinggi, seperti infrastruktur, pendidikan, riset, dan teknologi.
- 4) Meningkatkan Iklim Investasi: Reformasi regulasi, penyederhanaan perizinan, dan penyediaan insentif perlu terus dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investor domestik maupun asing.
- 5) Pemerataan Pembangunan Wilayah: Pemerintah harus mendorong penyebaran investasi ke luar Pulau Jawa dengan membangun infrastruktur pendukung dan memberikan insentif khusus bagi pengembangan daerah tertinggal.
- 6) Integrasi Ekonomi Digital dan Hijau: Untuk pertumbuhan jangka panjang, penting mengembangkan sektor digital dan mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis inovasi.
- 7) Sinergi Lintas Sektor: Kolaborasi antara pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan global.

Daftar Pustaka

20108010134_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. (n.d.).

- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). Analisis Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mendukung Good Governance Dalam Memasuki MEA (Studi Empiris Propinsi Di Indonesia Tahun 2010-2014). *Book of Proceedings Published by Universitas Negeri Padang*, c, 1–19.
- Dumais, J. D., Rotinsulu, T. O., & Walewangko, E. N. (2022). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 49–60.
- Ghaffar Ismail, A. (2010). *Money, Islamic Banks and the Real Economy* (second edition). Cengage Learning.
- Jordan, A., & Nuringsih, K. (2023). UNDERSTANDING FINANCIAL BEHAVIOR IN GENERATION Z. *International Journal of Application on Economics and Business*, 1(4), 2535–2546. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i4.2535-2546>
- Khakim, A. (2022). Pengaruh Investasi Dalam Perekonomian. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai*, 14(2), 1–10.
- Meylianingrum, K., El Fahmi, E. F. F., & Jaya, T. J. (2023). Optimization of Digital Branding and Marketing for Gempol MSMEs Through WhatsApp Business: Optimalisasi Digital Branding dan Marketing pada UMKM Gempol Melalui WhatsApp Business.

Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(6), 1528–1533.
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i6.15273>